

Potensi Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) di Kabupaten Konawe Selatan

(The potential of smallholder farming centre (SPR) development in Konawe Selatan district)

Hendhra Sudarno Saputra¹, Takdir Saili¹, Achmad Selamat Aku¹

¹Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara, Indonesia

achmad.s.aku@uho.ac.id

Abstrak. Potensi pengembangan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) dapat diketahui berdasarkan ketersediaan fasilitas fisik dan fasilitas non fisik. Tujuan dari penelitian ini menganalisis potensi kawasan SPR berdasarkan ketersediaan fasilitas fisik dan non fisik di Kabupaten Konawe Selatan. Lokasi penelitian adalah daerah Kabupaten Konawe Selatan yaitu Kecamatan Mowila, Kecamatan Landonno, dan Kecamatan Buke. Aspek yang diteliti adalah ketersediaan sarana fasilitas fisik dan non fisik yang mendukung pengembangan SPR. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan potensi SPR dari segi ketersediaan fasilitas fisik dan non fisik di Kabupaten Konawe Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas fisik yang tersedia di Kecamatan Mowila, Kecamatan Landonno, dan Kecamatan Buke yaitu padang penggembalaan, kebun hijauan pakan ternak (HPT), gudang pakan (Kecamatan Landonno), puskesmas, petugas teknis kesehatan hewan, fasilitas pos IB (Kec. Landonno dan Kec. Buke), petugas inseminator, dan rumah potong hewan (Kec. Landonno dan Kec. Buke), dan fasilitas non fisik yang tersedia yaitu lembaga kemitraan. Kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwa dari segi fasilitas fisik dan non fisik, Kecamatan Mowila, Kecamatan Landonno, dan Kecamatan Buke berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan SPR.

Kata kunci: SPR, peternakan, fasilitas fisik, fasilitas non fisik

Abstract. The potential of Sentra Peternakan Rakyat (SPR) development was indicated by the availability based on physical and non-physical facilities. The objective of this study was to evaluate the potential of SPR development area based on availability of physical facilities and non-physical facilities in Konawe Selatan district. The study was conducted in subdistrict of Mowila, Landonno, and Buke. The observed aspects in this study were availability of physical facilities and non-physical facilities that can support the development of SPR. Data collected were analyzed using descriptive analysis to describe the SPR potential. The result showed that physical facilities available in Mowila, Landonno, and Buke were pasture area, forages, feed storage (at Landonno), animal health post, animal paramedics/veterinarian, artificial insemination station facilities (at Landonno and Buke), inseminator, and slaughterhouse (at Landonno and Buke). The non-physical facility available was partnership board. It was concluded that and on the physical and non-physical facilities, the subdistrict of Mowila, Landonno, and Buke have a potential to establish as SPR area.

Keywords: SPR, livestock, physical facilities, non-physical facilities

1. Pendahuluan

Perbaikan sistem peternakan rakyat di Indonesia agar menjadi peternakan rakyat yang mandiri dan berdaulat perlu mendapat perhatian dari pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung usaha peternakan tersebut. Salah satu pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam upaya menciptakan peternak mandiri dan berdaulat adalah pembentukan kawasan peternakan. Pembentukan kawasan peternakan melalui pendekatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dapat ditempuh melalui program Sentra Peternakan Rakyat (SPR)

Sentra Peternakan Rakyat (SPR) diharapkan menjadi pusat pertumbuhan komoditas peternakan dalam suatu kawasan peternakan yang berfungsi sebagai media pembangunan peternakan dan

kesehatan hewan yang di dalamnya terdapat satu populasi ternak tertentu yang sebagian besar dimiliki oleh peternak yang bermukim di satu desa atau lebih dan sumberdaya alam untuk kebutuhan hidup ternak (air dan bahan pakan). Selanjutnya batasan populasi ternak dan skala kepemilikan ternak setiap SPR yaitu komoditas sapi potong indukan minimal 1.000 ekor ternak dan jantan maksimal 100 ekor ternak sapi dengan skala kepemilikan ternak idukan maksimal per peternak yang dipelihara secara intensif 5 ekor, integrasi 15 ekor, dan ekstensif 30 ekor ternak sapi potong.

Daerah Kabupaten Konawe Selatan memiliki populasi ternak sapi potong yang cukup tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 ternak sapi di Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 58.583 ekor ternak sapi, pada tahun 2014 meningkat menjadi 60.915 ekor ternak sapi, demikian pada tahun 2015 meningkat menjadi 62.616 ekor ternak sapi [1]. Oleh karena itu Kabupaten Konawe Selatan berpotensi dijadikan daerah pengembangan kawasan Sentra Peternakan Rakyat (SPR).

2. Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan pada bulan September hingga Oktober 2016, dengan mengambil sampel pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Landono, Kecamatan Mowila, dan Kecamatan Buke. Ketiga kecamatan tersebut telah diusulkan penetapannya sebagai wilayah Sentra Peternakan Rakyat (SPR) kepada Direktorat Jenderal Peternakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Penentuan lokasi dilakukan dengan pertimbangan (*purposive sampling*) yaitu dengan memilih tiga kecamatan yang telah diusulkan penetapannya sebagai wilayah Sentra Peternakan Rakyat (SPR) kepada Direktorat Jenderal Peternakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan yaitu Kecamatan Landono, Kecamatan Mowila, dan Kecamatan Buke. Responden terdiri atas pengurus Sentra Peternakan Rakyat (SPR), dan anggota kelompok (SPR). Responden dari pengurus SPR 26 Orang, dan anggota kelompok 61 Orang sehingga total keseluruhan jumlah responden adalah 87 Orang. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode survei ke seluruh kawasan SPR pada Kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan.

Variabel pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu: dukungan fasilitas fisik SPR meliputi: Padang Penggembalaan/Rumput, Kebun Hijauan Pakan Ternak (HPT), Pabrik/Gudang Pakan, Puskesmas, Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Fasilitas Pos IB dan Petugas Inseminator, dan Rumah Potong Hewan (RPH); dan dukungan fasilitas non fisik SPR meliputi: Lembaga Kemitraan, Lembaga Keuangan, dan Koperasi.

Data dan informasi yang diperoleh selanjutnya akan ditabulasi dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan potensi SPR dari segi ketersediaan fasilitas fisik dan non fisik di Kabupaten Konawe Selatan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Potensi pengembangan kawasan sentra peternakan rakyat (SPR) dilihat dari ketersediaan fasilitas fisik

Padang Penggembalaan. Total luas padang penggembalaan pada kawasan SPR di Kabupaten Konawe Selatan adalah 60 Ha dan terletak pada tiga Kecamatan. Luas padang penggembalaan tertinggi terletak pada Kecamatan Landono dengan luas 50 Ha (83%) dan terdapat di 40 titik dengan luas yang berbeda. Sedangkan di Kecamatan Mowila 8 Ha (13,3%) terdapat di 20 titik dengan luas yang berbeda, dan di Kecamatan Buke 2 Ha (3,3%) terdapat di satu tempat. Berdasarkan ketersediaan padang penggembalaan yang ada pada kawasan SPR masih rendah dan perlu adanya penambahan luas padang penggembalaan terutama pada Kecamatan Mowila dan Kecamatan Buke karena pada usaha peternakan rakyat khususnya peternak sapi potong yang dipelihara dengan cara diliarikan (*grazing*) ketersediaan padang penggembalaan sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hijauan pakan ternak. Hasil penelitian ketersediaan fasilitas fisik SPR di Kecamatan Mowila, Kecamatan Landono, dan Kecamatan Buke disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ketersediaan Fasilitas Fisik dalam Pengembangan Kawasan SPR di Kecamatan Mowila, Kecamatan Landonono, dan Kecamatan Buke

Variabel	Kecamatan Mowila		Kecamatan Landonono		Kecamatan Buke		Total	
	N	%	n	%	n	%	n	%
Padang Penggembalaan (Ha)	8	13,3	50	83,3	2	3,3	60	100
Kebun Hijauan Pakan Ternak (Ha)	1	8,9	0,25	2,2	10	88,9	11,25	100
Pabrik/Gudang Pakan (Unit)	0	0	1	100	0	0	1	100
Fasilitas Puskesmas (Unit)	1	33,3	1	33,3	1	33,3	3	100
Petugas Teknis Kesehatan Hewan (Orang)	1	25	1	25	2	50	4	100
Fasilitas Pos IB (Unit)	0	0	1	50	1	50	2	100
Jumlah Petugas Inseminator (Orang)	2	40	1	20	2	40	5	100
Fasilitas RPH (Unit)	0	0	1	50	1	50	2	100

Padang penggembalaan adalah areal untuk menggembalakan ternak ruminansia dengan manajemen pemeliharaan diliarikan (*grazing*) dalam mendukung efisiensi tenaga kerja dalam budidaya ternak, dengan sistem ternak diumbar di lahan tertentu pada periode tertentu, ternak bebas memilih hijauan yang dibutuhkan, sehingga memacu produktivitas ternak [2].

Kebun Hijauan Pakan Ternak (HPT). Total luas kebun HPT pada kawasan SPR yang berada di Kabupaten Konawe Selatan yakni 11,25 Ha dan berada di tiga kecamatan. Kecamatan yang memiliki luas kebun HPT tertinggi yaitu Kecamatan Buke dengan luas 10 Ha (88,9%) dan terletak di 25 titik dengan luas yang berbeda. Sedangkan sisanya pada Kecamatan Mowila 1 Ha (8,9%) terletak di 20 titik dengan luas yang berbeda, dan Kecamatan Landonono 0,25 Ha (2,2%) terletak di 8 titik dengan luas yang berbeda. Berdasarkan data luas kebun HPT pada kawasan SPR di Kabupaten Konawe Selatan masih perlu penambahan luas kebun HPT.

Dalam meningkatkan produksi ternak ruminansia ketersediaan hijauan makanan ternak merupakan bagian yang terpenting, karena lebih dari 70% dari ransum ternak terdiri dari pakan hijauan, untuk itu diperlukan upaya penyediaan hijauan pakan ternak (HPT) yang berkualitas dan berkesinambungan [3].

Pabrik/Gudang Pakan. Berdasarkan data pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa ketersediaan gudang pakan pada kawasan SPR di Kabupaten Konawe Selatan terletak pada Kecamatan Landonono dengan jumlah 1 unit gudang pakan. Sedangkan Kecamatan Mowila dan Kecamatan Buke tidak memiliki fasilitas gudang pakan. Gudang pakan berfungsi sebagai tempat penyimpanan hijauan pakan ternak sebelum diberikan kepada ternak.

Fasilitas Puskesmas. Fasilitas puskesmas pada kawasan SPR di Kabupaten Konawe Selatan berjumlah 3 unit yang terletak pada tiga Kecamatan yakni Kecamatan Mowila 1 unit, Kecamatan Landonono 1 unit dan Kecamatan Buke 1 unit, jika dipersentasekan jumlah masing - masing Kecamatan yaitu 33,3% dari total keseluruhan puskesmas yang berada pada kawasan SPR di Kabupaten Konawe Selatan. Dengan adanya fasilitas puskesmas dapat membantu petugas kesehatan hewan dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan.

Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pos Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan [4]. Lebih lanjut dikatakan bahwa kegiatan pelayanan Puskesmas dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar Puskesmas, kegiatan pelayanan Puskesmas yang dilakukan di luar Puskesmas dilaksanakan oleh petugas Puskesmas dengan mengunjungi tempat/lokasi yang memerlukan pelayanan kesehatan hewan.

Petugas Teknis Kesehatan Hewan. Jumlah petugas teknis kesehatan hewan pada kawasan SPR di Kabupaten Konawe Selatan adalah 4 orang. Dokter hewan pada kawasan SPR berjumlah 1 orang dan berada di Kecamatan Mowila sedangkan 3 orang lainnya hanya petugas teknis kesehatan hewan yang memberikan pelayanan teknis kesehatan hewan dan berada di Kecamatan Landonono 1 orang dan Kecamatan Buke 2 orang. Adanya petugas teknis kesehatan hewan pada suatu kawasan SPR dapat membantu peternak dalam memberikan pelayanan teknis kesehatan hewan untuk ternaknya. Salah satu tugas pokok dari petugas kesehatan hewan yaitu pencegahan penyakit pada hewan [5].

Fasilitas Pos IB dan Petugas Inseminator. Pos IB yang berada pada kawasan SPR di Kabupaten Konawe Selatan berjumlah 2 unit, Pos IB ini terdapat di Kecamatan Landono berjumlah 1 unit (50%) dan Kecamatan Buke 1 unit (50%). Sedangkan petugas inseminator terdapat di tiga kecamatan dengan jumlah 5 orang, kecamatan yang memiliki petugas inseminator lebih banyak yakni Kecamatan Mowila berjumlah 2 orang (40%) dan Kecamatan Buke berjumlah 2 orang (40%), sedangkan di Kecamatan Landono hanya memiliki petugas inseminator 1 orang (20%). Dengan adanya pos IB dan petugas Inseminator akan membantu peternak dalam mengawinkan ternaknya apabila ingin mengawinkannya dengan cara inseminasi buatan (IB), walaupun tidak terdapat Pos IB pada suatu daerah tertentu tetapi ada petugas inseminator berserta alat-alat yang dapat digunakan maka pelayanan inseminasi buatan (IB) akan tetap berjalan.

Fasilitas RPH. Kawasan SPR di Kabupaten Konawe Selatan yang memiliki fasilitas RPH yaitu SPR yang berada di Kecamatan Landono 1 unit dan SPR yang berada di Kecamatan Buke 1 unit sedangkan SPR yang berada di Kecamatan Mowila tidak memiliki fasilitas RPH. Jika dipersentasekan kedua SPR yang memiliki fasilitas RPH yakni 50% per SPR dari total keseluruhan fasilitas RPH yang berada pada kawasan SPR di Kabupaten Konawe Selatan.

RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan: 1) pemotongan hewan secara benar, (sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah agama), 2) pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*) dan pemeriksaan karkas, dan jeroan (*post-mortem inspektion*) untuk mencegah penularan penyakit zoonotik ke manusia, 3) pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan *ante-mortem* dan pemeriksaan *post-mortem* guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan [6].

3.2 Potensi pengembangan kawasan sentra peternakan rakyat (SPR) dilihat dari ketersediaan fasilitas non fisik

Lembaga Kemitraan. Lembaga Kemitraan di Kecamatan Mowila, Kecamatan Landono, dan Kecamatan Buke disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ketersediaan Lembaga Kemitraan Peternak dalam Pengembangan Kawasan SPR di Kecamatan Mowila, Kecamatan Landono, dan Kecamatan Buke

No	Kecamatan	Lembaga Kemitraan	Bentuk Pelayanan
1	Mowila	Kabupaten	Pendampingan Teknis
2	Landono	Kabupaten, Propinsi, UHO	Pendampingan Teknis dan Peralatan
3	Buke	BM, LEM	Pendampingan Teknis dan Peralatan

Data pada tabel 2 menunjukkan kerjasama dengan lembaga kemitraan terdapat di kawasan SPR yakni Kecamatan Mowila bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dalam bentuk pendampingan teknis. Kecamatan Landono bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan Universitas Halu Oleo dalam bentuk pendampingan teknis dan peralatan, sedangkan kecamatan buke bekerja sama dengan lembaga BM dan LEM dalam bentuk pendampingan teknis dan peralatan.

Lembaga Keuangan. Berdasarkan hasil penelitian pada kawasan SPR di Kabupaten Konawe Selatan yang terletak di tiga kecamatan yakni Kecamatan Mowila, Kecamatan Landono dan Kecamatan Buke tidak terdapat lembaga keuangan. Dalam sektor peternakan perlu adanya lembaga keuangan yang dapat menjadi alternatif sumber dana bagi peternak di pedesaan. Ada beberapa lembaga keuangan yakni bank umum, BPR, dan lainnya. Untuk menjawab permasalahan keterbatasan modal, maka perlu lebih mengoptimalkan potensi lembaga keuangan yang dapat menjadi alternatif sumber dana bagi petani dan masyarakat pedesaan [7].

Koperasi. Berdasarkan hasil penelitian pada kawasan SPR di Kabupaten Konawe Selatan tidak terdapat koperasi. Koperasi dapat membantu ekonomi masyarakat khususnya yang termasuk anggota koperasi dan untuk membangun, mengembangkan potensi usaha serta meningkatkan perekonomian

masyarakat pada umumnya. Harapan peternak pada kawasan SPR yang terletak di tiga kecamatan yakni Kecamatan Mowila, Kecamatan Landono dan Kecamatan Buke segera dibentuk koperasi agar dapat membantu ekonomi masyarakat pada kawasan SPR.

Tujuan dan peranan koperasi membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya [8].

4. Kesimpulan

Kecamatan Mowila, Kecamatan Landono, dan Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan dari segi ketersediaan fasilitas fisik (padang penggembalaan, kebun hijauan pakan ternak, gudan pakan, puskesmas, petugas teknis kesehatan hewan, fasilitas Pos IB dan petugas inseminator, dan fasilitas rumah potong hewan) dan non fisik (lembaga kemitraan) berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan SPR.

5. Daftar Pustaka

- [1] BPS Kabupaten Konawe Selatan. 2016. Kabupaten Konawe Selatan dalam Angka 2016. Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan. Andoolo.
- [2] Sudaryanto dan Priyanto. 2008. Degradasi Padang Penggembalaan. Balai Penelitian Ternak.
- [3] Farizaldi. 2011. Produktivitas Hijauan Makanan Ternak Pada Lahan Perkebunan Kelapa Sawit berbagai Kelompok Umur di PTPN 6 Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi. Jurnal Ilmiah Ilmu - Ilmu Peternakan, 14(2):68-73.
- [4] Permentan. 2007. Peraturan Menteri Pertanian No 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan. Menteri Pertanian Republik Indonesia. Jakarta.
- [5] Tahulending, J., D. Kandou dan B. Ratang. 2015. Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Tindakan Pencegahan Penyakit Rabies di Kelurahan Makawidey Kecamatan Aertembaga Kota Bitung. Suplemen, 5(1):169-178.
- [6] Permentan. 2010. Peraturan Menteri Pertanian No 13 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*). Menteri Pertanian Republik Indonesia. Jakarta.
- [7] Saleh, Y. dan Y. Hidayat. 2011. Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Mendukung Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan. Jurnal Ilmu - Ilmu Pertanian, 7(1):66-81.
- [8] Ukanda, N.B. 2011. Apa, Mengapa, dan Bagaimana Koperasi? (All about Cooperation). Bahan Ajar. Prodi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi, UPI.